



REPUBLIK INDONESIA

**Memorandum Saling Pengertian
Tentang Pendidikan Kejuruan dan Kerja Sama Pelatihan antara
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
dan
Kementerian Inovasi dan Teknologi Hongaria**

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian Inovasi dan Teknologi Hongaria yang selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak";

Berkeinginan untuk mendirikan dan mengembangkan kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan kejuruan,

Mengakui bahwa tantangan Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan serta Pembelajaran Orang Dewasa, yang selanjutnya disebut sebagai "VET", memiliki karakter regional dan global dan fakta bahwa mereka adalah program-program penting yang membutuhkan tanggapan yang efisien untuk memenuhi tuntutan pasar tenaga kerja yang berubah dengan cepat;

Menyadari manfaat timbal balik dalam pengembangan VET di kedua negara dan konsekuensi bahwa kerja sama akan semakin memperkuat kemitraan antara negara mereka;

Mengacu pada Perjanjian Kerja Sama Ilmiah dan Teknis antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Hongaria yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 5 September 1961;

Berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara Pihak;

Telah menyetujui sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan dari Memorandum Saling Pengertian ini adalah untuk membangun dan memperkuat kerja sama di bidang VET antara Para Pihak, selanjutnya untuk

menerapkan kemitraan jangka panjang berdasarkan kedudukan yang setara dan saling menguntungkan.

Pasal 2

Memorandum Saling Pengertian ini akan diimplementasikan terutama di bidang-bidang berikut:

- a. Praktik terbaik dalam sistem VET;
- b. Meningkatkan daya tarik VET;
- c. Model pendanaan VET;
- d. Program pembelajaran orang dewasa dalam pendidikan informal dan nonformal;
- e. Program mobilitas dalam VET; dan
- f. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia di VET.

Pasal 3

Memorandum Saling Pengertian ini akan dilaksanakan melalui:

- a. Pertukaran data dan informasi pendidikan/pelatihan yang relevan, termasuk kebijakan VET;
- b. Penyelenggaraan kunjungan studi para ahli;
- c. Mengadakan lokakarya, simposium dan acara lainnya; dan
- d. Pertukaran program untuk para ahli, guru, tenaga kependidikan, dan siswa sekolah kejuruan.

Pasal 4

1. Untuk mengimplementasikan Memorandum Saling Pengertian ini, Para Pihak akan menunjuk koordinator sebagai perwakilan mereka dari para pihak. Koordinator akan bertemu pada kurun waktu yang disepakati oleh Para Pihak untuk meninjau tahapan dan membina kerja sama, secara bergantian di Hongaria atau di Republik Indonesia.
2. Setiap Pihak harus menanggung biaya perjalanan dan akomodasi delegasinya kecuali jika disetujui sebaliknya. Jika ada Pihak yang membutuhkan bantuan teknis dari Pihak lain, biaya yang timbul dari asistensi tersebut akan menjadi beban dari Pihak yang membutuhkan.

Pasal 5

Pelaksanaan Memorandum saling pengertian ini akan ditetapkan dalam pengaturan terpisah yang harus mematuhi undang-undang nasional Para Pihak.

Pasal 6

1. Setiap pihak akan memastikan upaya hukum untuk melindungi kekayaan hak intelektual semua bahan yang diperoleh dalam kerangka

Memorandum Saling Pengertian ini, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di negara mereka.

2. Hak kekayaan intelektual yang diperoleh atau dibuat sebagai hasil dari kegiatan bersama sesuai dengan Memorandum Saling Pengertian ini akan diatur sesuai persyaratan yang disepakati bersama yang ditetapkan dalam pengaturan terpisah sebelum memulai kegiatan bersama.
3. Tidak ada Pihak yang akan memindahkan informasi rahasia yang memiliki nilai komersial yang didapat dalam rangka Memorandum Saling Pengertian ini kepada pihak ketiga tanpa sebelumnya ada persetujuan tertulis Pihak darimana informasi tersebut berasal.

Pasal 7

1. Para Pihak wajib menjaga kerahasiaan dokumen, informasi dan data lainnya yang diterima yang dipindahkan ke Pihak lain dalam rangka pelaksanaan Memorandum saling Pengertian ini serta pengaturan lain yang ditandatangani sesuai dengan Memorandum Saling Pengertian ini.
2. Dokumen atau informasi hanya bisa dipindahkan kepada pihak ketiga atas persetujuan tertulis dari Para Pihak.

Pasal 8

Memorandum Saling Pengertian ini tidak memiliki dampak pada kewajiban bilateral atau multilateral lainnya dari salah satu Pihak. Memorandum Saling Pengertian ini tidak memiliki dampak pada kewajiban yang timbul dari keanggotaan Hungaria di Uni Eropa.

Pasal 9

Para Pihak harus memastikan bahwa personel mereka yang terlibat di dalam kegiatan di bawah Memorandum Saling Pengertian ini hanya akan terlibat dalam kegiatan di bawah kerangka Memorandum saling Pengertian ini sesuai dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing negara.

Pasal 10

Setiap perselisihan antara Para Pihak terkait dengan interpretasi atau penerapan Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan melalui konsultasi dan negosiasi.

Pasal 11

Memorandum Saling Pengertian ini dapat diubah dengan persetujuan tertulis bersama Para Pihak. Perubahan tersebut mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh Para Pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memorandum Saling Pengertian ini.

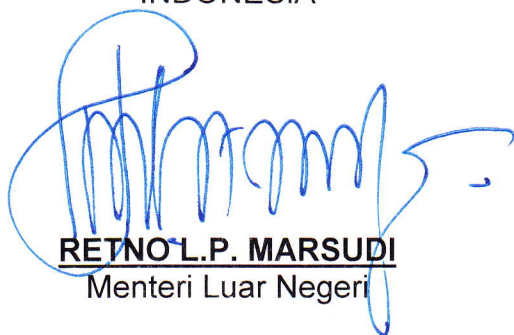
Pasal 12

1. Memorandum Saling Pengertian ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganannya.
2. Memorandum Saling Pengertian ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun.
3. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Memorandum Saling Pengertian dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya. Memorandum Saling Pengertian ini akan berakhir enam bulan setelah diterimanya pemberitahuan.
4. Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak akan mempengaruhi pelaksanaan proyek yang sedang berjalan dan penyelesaian kegiatan yang telah disepakati sebelumnya.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan di bawah ini, yang telah diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Memorandum Saling Pengertian ini


Ditandatangani pada *Budapest* pada "*September 17*" 2019 dalam dua salinan asli, dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Hongaria dan Bahasa Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah dalam bahasa Inggris yang berlaku.

UNTUK
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK
INDONESIA



RETNO L.P. MARSUDI
Menteri Luar Negeri

UNTUK
KEMENTERIAN INOVASI DAN
TEKNOLOGI HUNGARIA



PÉTER SZIJJÁRTÓ
Menteri Luar Negeri dan Perdagangan



REPUBLIK INDONESIA

**Memorandum of Understanding
on Vocational Education and Training Cooperation between
the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia
and
the Ministry for Innovation and Technology of Hungary**

The Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia and the Ministry for Innovation and Technology of Hungary (hereinafter referred to as the "Parties");

Desiring to set up and develop cooperation in the field of vocational education and training;

Recognizing that the challenges of Vocational Education and Training as well as of Adult Learning (hereinafter referred to as "VET") have regional and global character and the fact that they are important programs that require efficient responds to meet the quickly changing demands of the labour market;

Being aware of the mutual benefits in development of VET in both countries and the consequences that the cooperation would further strengthen partnership between their countries;

Referring to the Agreement on Scientific and Technical Cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Hungarian People's Republic signed in Jakarta on September 5, 1961;

Pursuant to the prevailing laws and regulations of the respective countries of the Parties;

Have agreed as follows:

Article 1

The objective of the present Memorandum of Understanding is to establish and strengthen cooperation in the area of VET between the Parties, furthermore to implement a long-term partnership on the basis of full equality of rights and mutual benefits.

Article 2

This Memorandum of Understanding shall be implemented primarily in the following areas:

- a. Best practices in the VET system;
- b. Increasing the attractiveness of VET;
- c. Funding models of VET;
- d. Adult learning programmes in informal and nonformal education;
- e. Mobility programs in VET; and
- f. Human Resources Development Programs in VET.

Article 3

This Memorandum of Understanding shall be implemented through:

- a. Exchange of relevant educational/training data and information, including policy on VET;
- b. Organization of study visits of experts;
- c. Holding of workshops, symposium and other events; and
- d. Exchange programs for experts, teachers, educational personnel, and students of vocational schools.

Article 4

1. In order to implement the present Memorandum of Understanding the Parties will designate coordinators as their representatives from the Parties. The coordinators will meet at time periods agreed upon by the Parties to review the phases of cooperation and duly foster them, alternately in Hungary or in the Republic of Indonesia.
2. Each Party shall bear the cost of travelling and accommodation of its delegation unless otherwise agreed. Should any the Parties require technical assistance from the other Party, the adjoining cost will be covered by the Party requiring the technical assistance.

Article 5

The implementation of the present Memorandum of Understanding will be stipulated in separate arrangements which shall comply with the national legislation of the Parties.

Article 6

1. Each party will ensure legal means for the protection of intellectual property rights of all materials obtained in the framework of this Memorandum of Understanding, in accordance with the laws and regulations in force in their country.

2. Intellectual property rights acquired or created as a result of joint activity in accordance with this Memorandum of Understanding will be allocated by mutually agreed conditions set out in separate arrangements prior to commencing the joint activity.
3. No Party shall transmit any commercially valuable confidential information obtained in pursuance of this Memorandum of Understanding to any third Party without prior written consent of the Party from which such information originated.

Article 7

1. The Parties are obliged to confidentiality of the documents, information and other data received or transferred to the other Party within the framework of implementation of this Memorandum of Understanding as well as other arrangements signed in compliance with this Memorandum of Understanding.
2. Confidential documents or information may only be transferred to third parties upon the written agreement of the Parties.

Article 8

The present Memorandum of Understanding does not have any effect on other bi- or multilateral obligations of any of the Parties. The present Memorandum of Understanding does not have any effect on the obligations arising from the membership of Hungary in the European Union.

Article 9

The Parties shall ensure that their personnel engaged in the activities under this Memorandum of Understanding shall engage only in activities under the framework of this Memorandum of Understanding with respect to the national laws and regulations of the respective countries.

Article 10

Any disputes between the Parties related to the interpretation or application of this Memorandum of Understanding will be resolved by means of consultations and negotiations.

Article 11

This Memorandum of Understanding may be amended by mutual written consent of the Parties. Such amendment shall enter into force on the date as determined by the Parties and shall constitute an integral part of this Memorandum of Understanding.

Article 12

1. This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its signature.
2. This Memorandum of Understanding shall remain in force for a period of five (5) years.
3. Either Party may terminate the Memorandum of Understanding by giving written notice to the other Party. The Memorandum of Understanding will be terminated six months following the receipt of the notice.
4. The termination of this Memorandum of Understanding shall not affect the Implementation of the projects under way and the completion of activities prior agreed.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Memorandum of Understanding.

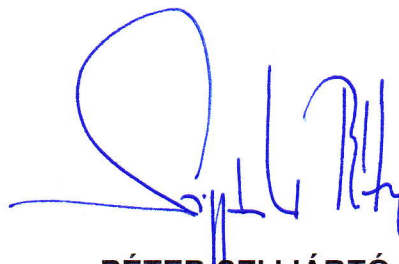
Done at Budapest on "September, 17" 2019 in two original copies, in the Indonesian, Hungarian and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE MINISTRY OF
EDUCATION AND CULTURE OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA

FOR THE MINISTRY FOR
INNOVATION AND TECHNOLOGY
OF HUNGARY



RETNO L.P. MARSUDI
Minister for Foreign Affairs



PÉTER SZIJJÁRTÓ
Minister for Foreign Affairs and Trade



REPUBLIK INDONESIA

Egyetértési Szándéknyilatkozat
az Indonéz Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma és
Magyarország Innovációs és Technológiai Minisztériuma
között
a szakképzés területén való együttműködésről

Az Indonéz Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériuma és Magyarország Innovációs és Technológiai Minisztériuma (a továbbiakban a "Felek");

A szakképzés területén való együttműködés kialakítása és fejlesztése szándékával;

Felismerve, hogy a szakképzés, csakúgy, mint a felnőttkori tanulás (a továbbiakban "szakképzés") kihívásai regionális és globális jellegűek és elismerve, hogy ezek fontos programok, melyek segíthetnek a gyorsan változó munkaerőpiaci igényekre való hatékony válaszadásban;

Annak tudatában, hogy az együttműködés kölcsönös előnyökkel jár a szakképzés fejlesztése érdekében mindkét országban, ami tovább fogja erősíteni a két ország közötti partnerséget;

Hivatkozva az Indonéz Köztársaság Kormánya és a Magyar Népköztársaság Kormánya között 1961. szeptember 5-én Jakartában aláírt tudományos és műszaki együttműködésről szóló megállapodásra;

A Felek országainak hatályos törvényei és rendeletei szerint;

A következőkben állapodtak meg:

1. cikk

Jelen Szándéknyilatkozat célja együttműködés kialakítása és erősítése a Felek között a szakképzés területén, továbbá hosszú távú partnerség megvalósítása teljes jogegyenlőség és kölcsönös előnyök alapján.

2. cikk

Jelen Szándéknyilatkozatot elsősorban az alábbi területeken kell végrehajtani:

- a. A jelenlegi szakképzési rendszer jó gyakorlatainak beazonosítása;
- b. A szakképzés vonzerejének növelése;
- c. A szakképzés finanszírozási modelljei;
- d. Felnőttképzési programok az informális és nem-formális oktatásban;
- e. Mobilitási programok a szakképzésben; és
- f. Humánerőforrás-fejlesztési programok a szakképzésben.

3. cikk

Jelen Szándéknyilatkozatot az alábbiak révén kell végrehajtani:

- a. Vonatkozó oktatási / képzési adatok és információk cseréje, ideértve a szakképzési szakpolitikáról szóló információkat;
- b. Szakértői tanulmányutak szervezése;
- c. Workshop-ok, szimpóziumok és egyéb rendezvények tartása; és
- d. Csereprogramok a szakképzési intézmények vezetőinek, tanárainak, adminisztratív munkatársainak és diákjainak számára

4. cikk

1. Jelen Szándéknyilatkozat végrehajtása érdekében a Felek koordinátorokat jelölnek ki képviselőikre. A koordinátorok a Felek által egyeztetett időközönként fognak találkozni, hogy áttekintsék és megfelelőképp elősegítsék az együttműködés fázisait, felváltva Magyarországon és az Indonéz Köztársaságban.
2. Mindegyik Fél viseli küldöttségének utazási és szállásköltségeit, hacsak másként nem állapodnak meg. Ha bármelyik Fél technikai segítségnyújtást igényel a másik Félről, a kapcsolódó költségeket a technikai segítségnyújtást igénylő Fél fedezi.

5. cikk

A jelen Szándéknyilatkozat végrehajtását külön megállapodásokban kell meghatározni, amelyeknek meg kell felelniük a Felek nemzeti jogszabályainak.

6. cikk

1. Hatályos nemzeti törvényeivel és jogszabályaival összhangban mindkét Fél biztosítja a jelen Szándéknyilatkozat keretében keletkeztetett

mindenfajta szellemi tulajdonjogok védelméhez szükséges jogi eszközöket.

2. A jelen Szándéknyilatkozattal összhangban folytatott közös tevékenység eredményeként megszerzett vagy létrehozott szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat a közös tevékenység megkezdése előtt külön megállapodásban meghatározott, kölcsönösen elfogadott feltételekkel kell felosztani.
3. A jelen Szándéknyilatkozatban szerzett, kereskedelmi szempontból értékes bizalmas információt egyik Fél sem adhatja át semmilyen harmadik Fél részére azon Fél előzetes írásbeli beleegyezése nélkül, amely részéről az ilyen információ származik.

7. cikk

1. A Felek kötelesek a jelen Szándéknyilatkozat végrehajtása keretében a másik Féltől kapott vagy számára átadott dokumentumok, információk és egyéb adatok titkosságát megtartani, csakúgy, mint az ezen Szándéknyilatkozatnak megfelelően aláírt egyéb megállapodásokét.
2. Bizalmas dokumentumokat vagy információkat csak a Felek írásbeli beleegyezésével lehet átadni harmadik Feleknek.

8. cikk

Jelen Szándéknyilatkozat nem befolyásolja a Felek egyéb két-, illetve többoldalú megállapodásaiból származó kötelezettségeit. Jelen Szándéknyilatkozat nem befolyásolja Magyarországnak az Európai Unió tagóságából eredő kötelezettségeit.

9. cikk

Felek biztosítják, hogy jelen Szándéknyilatkozatban foglalt tevékenységeikben részt vevő munkatársaik csak és kizárólag e Szándéknyilatkozatban rögzített tevékenységekben vesznek részt, figyelemmel az adott ország nemzeti törvényeire és szabályozásaira.

10. cikk

Felek közötti bármely vitás kérdés, mely a fordításra vagy jelen Szándéknyilatkozat alkalmazására vonatkozik, egyeztetések és tárgyalások során kerül rendezésre.

11.cikk

Jelen Szándéknyilatkozat a Felek kölcsönös írásos egyetértésével módosítható. Az ilyen módosítás a Felek által meghatározott napon lép hatályba és ennek a Szándéknyilatkozatnak a szerves részét képezi.

12.cikk

1. Jelen Szándéknyilatkozat az aláírásának napján lép hatályba.
2. Jelen Szándéknyilatkozat egy öt (5) évig tartó időszakra hatályos.
3. A Szándéknyilatkozatot bármely Fél felmondhatja a másik Félhez eljuttatott írásbeli értesítéssel. A Szándéknyilatkozat az értesítés kézhezvételétől számított 6 hónap múlva veszti hatályát.
4. A Szándéknyilatkozat megszüntetése nem érinti a folyamatban lévő projektek végrehajtását és a korábban egyeztetett tevékenységek befejezését.

A FENTIEK HITELEÜL az alulírott személyek megfelelő felhatalmazás birtokában aláírták ezt az Egyetértési Szándéknyilatkozatot.

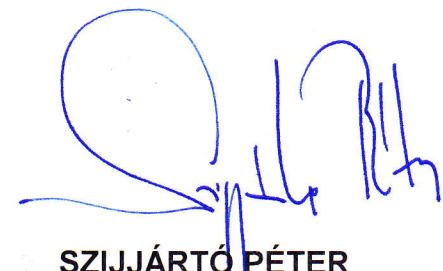
Készült Budapest, 2019. Szeptember 17 kettő eredeti példányban, indonéz, magyar és angol nyelven. Eltérő értelmezés esetén az angol szöveg az irányadó.

AZ INDONÉZ KÖZTÁRSASÁG
OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS
MINISZTERIUMA
NEVÉBEN

MAGYARORSZÁG
INNOVÁCIÓS ÉS TECHOLÓGIAI
MINISZTERIUMA
NEVÉBEN



RETNO L.P. MARSUDI
külügyminiszter



SZIJJÁRTÓ PÉTER
külgazdasági és külügyminiszter

mindenfajta szellemi tulajdonjogok védelméhez szükséges jogi eszközöket.

2. A jelen Szándéknyilatkozattal összhangban folytatott közös tevékenység eredményeként megszerzett vagy létrehozott szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat a közös tevékenység megkezdése előtt külön megállapodásban meghatározott, kölcsönösen elfogadott feltételekkel kell felosztani.
3. A jelen Szándéknyilatkozatban szerzett, kereskedelmi szempontból értékes bizalmas információt egyik Fél sem adhatja át semmilyen harmadik Fél részére azon Fél előzetes írásbeli beleegyezése nélkül, amely részéről az ilyen információ származik.

7. cikk

1. A Felek kötelesek a jelen Szándéknyilatkozat végrehajtása keretében a másik Féltől kapott vagy számára átadott dokumentumok, információk és egyéb adatok titkosságát megtartani, csakúgy, mint az ezen Szándéknyilatkozatnak megfelelően aláírt egyéb megállapodásokét.
2. Bizalmas dokumentumokat vagy információkat csak a Felek írásbeli beleegyezésével lehet átadni harmadik Feleknek.

8. cikk

Jelen Szándéknyilatkozat nem befolyásolja a Felek egyéb két-, illetve többoldalú megállapodásaiból származó kötelezettségeit. Jelen Szándéknyilatkozat nem befolyásolja Magyarországnak az Európai Unió tagóságából eredő kötelezettségeit.

9. cikk

Felek biztosítják, hogy jelen Szándéknyilatkozatban foglalt tevékenységeikben részt vevő munkatársaik csak és kizárólag e Szándéknyilatkozatban rögzített tevékenységekben vesznek részt, figyelemmel az adott ország nemzeti törvényeire és szabályozásaira.

10. cikk

Felek közötti bármely vitás kérdés, mely a fordításra vagy jelen Szándéknyilatkozat alkalmazására vonatkozik, egyeztetések és tárgyalások során kerül rendezésre.